



## HARIAN JOGJA

BULAN

JAN FEB **MART** APRIL MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOV DES 20..19

HAL : 12

TANGGAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

# Ketua Dewan Minta Proyek Pergola Tak Dihentikan

JOGJA—Ketua DPRD Jogja Henry Kuncoroyekti berharap dinas pelaksana proyek pergola tidak menghentikan proyek hanya karena adanya pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan pergola di Kota Jogja yang kini tengah diusut Kejaksaan Tinggi DIY.

“Selama masih ada usulan dari warga jangan dihentikan. Biarkan proses di Kejati berjalan beriringan dengan proyek pergola,” kata dia, Selasa (4/3).

Selama ini, kata dia, proyek pergola di 36 wilayah, di mana tiap kawasan dibangun 58 unit pergola, masing-masing senilai Rp147,9 juta itu berasal dari rancangan Pemkot dan usulan warga.

Untuk menghindari kemungkinan adanya dugaan korupsi, pihaknya berharap sekecil apapun proyek yang ada dijalankan dengan mekanisme lelang. “Soal pemeriksaan

terhadap anggota Dewan oleh Kejati terkait kasus yang ditangani, ya sebaiknya semua menghormati proses tersebut,” jelasnya.

Adapun mantan Kepala BLH yang kini duduk sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jogja, Eko Suryo M enggan berbicara banyak terkait dengan proyek yang dikerjakan era kepemimpinannya itu. Eko menandakan dia hanya mengusulkan, sedangkan untuk pelaksanaannya dilakukan pihak lain. “Saya memang usul tetapi tidak mengerjakan,” ucapnya singkat.

Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Heri Setyawacana membantah keterlibatan pihaknya dalam proyek tersebut. Dia beralasan selama ini

proyek pergola menjadi tanggung jawab BLH dan rekanan proyek.

“Kami hanya bertugas memantau pencatatan aset dan berkoordinasi dengan dinas yang bersangkutan. Soal proyek pergola itu jadi ranah teknis dinas yang bersangkutan,” katanya.

Walikota Jogja Haryadi Suyuti juga meminta semua pihak menghormati proses hukum kasus dugaan korupsi pergola di Kota Jogja yang kini diusut Kejati itu. Salah satunya adalah dengan

memberikan keterangan terkait proyek yang ditangani Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jogja dengan APBDP 2013 senilai Rp5,3 miliar tersebut.

“Saya minta semua menghormati proses hukum yang ada. Soal pemeriksaan terhadap 12 perwakilan kelurahan oleh pihak Kejati



itu kan rangkaian dari proses hukum,” kata Haryadi, Selasa.

Menurut Walikota sebelum memeriksa 12 perwakilan kelurahan, Kejati sebenarnya telah meminta keterangan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Jogja seperti Kepala BLH Kota Jogja Irfan Susilo. “BLH diperiksa lebih awal. Pada prinsipnya berikan keterangan yang sesuai,” jelasnya.

Disinggung mengenai kemungkinan evaluasi proyek pergola pada pengajuan APBD mendatang, Haryadi mengaku hal itu sampai saat ini tengah dikaji. Pengkajian diperlukan untuk memastikan apakah proyek pergola layak untuk diteruskan atau tidak sesuai kebutuhan warga.

Selain itu, Walikota juga memastikan selama ini semua proyek di lingkungan Pemkot telah menjalani audit. (Jumali)